

Abstrak

Pemerintah daerah sebagai salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aset tetap yang merupakan bagian dari komponen penyusunan laporan keuangan merupakan hal perlu di perhatikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik oleh karena itu sangat diperlukan penatausahaan siklus aset tetap yang memadai. Penatausahaan aset tetap di dasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kesesuaian antara praktik akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Batu dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan di tahun 2020. Penelitian ini membahas siklus aset tetap mulai dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan. Data yang digunakan adalah data yang bersifat sekunder dan primer dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi kepustakaan dan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan akuntansi aset tetap terkait definisi, pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap Pemerintah Kota Batu telah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Walaupun demikian, perlu dilakukan beberapa hal agar praktik akuntansi yang diterapkan berjalan dengan baik antara lain peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasana, kepatuhan para pegawai dan pimpinan serta pengendalian internal yang memadai.

Kata kunci: Aset tetap, Penatausahaan, PSAP 07, Pemerintah Daerah Kota Batu

Abstract

Local governments as one of the reporting entities are required to compile financial reports on accountability for state financial management sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) or Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Fixed assets which are part of the components of the preparation of financial statements are things that need to be considered and accounted for properly, therefore it is very necessary to administer adequate fixed asset cycles. The administration of fixed assets is based on Government Regulation (PP) No. 71 of 2010 concerning the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 concerning Accrual-Based Accounting for Fixed Assets. The purpose of this study is to compare the suitability of the accounting practice for fixed assets of the Batu City Government with the standards and regulations that have been set in 2020. This study discusses the fixed asset cycle from classification, recognition, measurement to presentation and disclosure. The data used are secondary and primary data and the methods used in data collection are library research methods and descriptive methods. The results of the study indicate that the application of fixed asset accounting related to the definition, classification, recognition, measurement, presentation and disclosure of fixed assets of the Batu City Government is in accordance with the established accounting standards. However, several things need to be done so that the accounting practices applied run well, including increasing understanding of Human Resources (HR), facilities and infrastructure, compliance by employees and leaders and adequate internal control.

Keywords: *fixed assets, administration, PSAP 07, Government Accounting Standards Number 07 of Fixed Asset Accounting, Batu City Regional Government.*